



Dinas Sosial P3A
Jl. Taman Pahlawan No.9
Purwakarta
Web. Dinsosp3a.purwaktakab.go.id



2022

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)



HUMANIS ADAPTIF DEDIKATIF INKLUSIF RESPONSIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tahun 2022 berorientasi kepada Rencana Kinerja Dinsos P3A Tahun 2022, Renstra Reviu DP3AKB Tahun 2018-2023, RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 serta DPA Dinsos P3A Tahun Anggaran 2022. Evaluasi dan Analisis LAKIP tersebut difokuskan kepada capaian kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2022.

Sasaran Strategis Dinsos P3A Mewujudkan **Kesejahteraan Sosial Masyarakat** yang tertuang dalam tujuan ke 2 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta dan sasaran pertama yaitu **Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan**

Indikator Kinerja Tahun 2022 terdiri dari :

1. Persentase Fakir miskin dan penyandang masalah Kesejahteraan social lainnya yang diberdayakan.
2. Persentase capaian pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial.
3. Presentase Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan.
4. Persentase peran serta gender dalam pembangunan

Dari indikator kinerja tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purwakarta menetapkan target penanganan PPKS sebanyak 49.474 jiwa atau 60,00 % dari populasi PPKS 82.236 jiwa. Sedangkan realisasi penanganan PPKS mencapai 105.310 jiwa atau 128 %. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purwakarta melalui Program kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar 128.05 % (Kategori Melampaui). Capaian positif ini karena adanya dukungan kebijakan, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana walaupun kondisinya masih kurang optimal, juga dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan

kesejahteraan sosial di Kabuapten Purwakarta. Selanjutnya secara fungsional target capaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purwakarta dengan memperhatikan kaidah profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai kesimpulan bahwa pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 secara umum telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan termasuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal.

Kegiatan, prosedur sesuai ketentuan, jumlah sasaran termasuk indikator kinerja dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan program kegiatan berjalan tepat waktu sehingga pelayanan bidang kesejahteraan sosial tidak mengalami keterlambatan. Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Program Kegiatan Pembangunan Urusan Sosial di yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Purwakarta efektif dan efisien serta akuntabel.

Indikator Kinerja kedua Tahun 2022 yaitu **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak** Presentase Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan, Persentase peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan Perempuan dan Persentase peran serta gender dalam pembangunan yang mendapat input peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Purwakarta.

Capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) bekerjasama dengan BPS-RI dengan hasil berikut:

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purwakarta menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir adalah 86,93 point (rilis 19 Februari 2021) dibanding target 86.78 poin maka tercapai 100.18 %.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purwakarta

menurut data BPS dan KPPA terakhir belum rilis, dan target Tahun 2022 yaitu 74.39 poin, sehingga capaian di tahun 2022 adalah 77.89 poin.

Angka-angka ini menunjukkan hasil pembangunan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengarusutamaan gender, yang selanjutnya dievaluasi oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bagi daerah yang mendapat nilai baik diberikan Penghargaan Presiden yaitu Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Penilaian APE dilaksanakan dua tahun sekali.

Indikator Persentase keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercapai sesuai target yaitu 100 persen, upaya yang dilakukan antara lain Tersedianya Tim Profesional Konselor dari Psikolog, KPAI dan bekerjasama dengan unit PPA Polres Purwakarta, melakukan Rapat Koordinasi Penanganan TPPO, Fasilitasi Koordinasi Penanganan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (KED), Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terhadap respon kasus dan Sosialisasi Internet Ramah Anak. Sedangkan pada Bale Titirah yang bertempat di Jl Raya Veteran N0. 380 Nagri Kaler, Kec/KAb Purwakarta 41115 , dengan adanya Layanan Asesmen Awal, Layanan Penjangkauan, Layanan Rumah Aman.

Indikator Persentase keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercapai sesuai target yaitu 100 persen, upaya yang dilakukan antara lain Tersedianya Tim Profesional Konselor dari Psikolog, KPAI dan bekerjasama dengan unit PPA Polres Purwakarta, melakukan Rapat Koordinasi Penanganan TPPO, Fasilitasi Koordinasi Penanganan Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (KED), Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) terhadap respon kasus dan Sosialisasi Internet Ramah Anak. Sedangkan pada Bale Titirah yang bertempat di Jl Raya Veteran N0. 380 Nagri Kaler, Kec/KAb Purwakarta 41115 , dengan

adanya Layanan Assesment Awal, Layanan Penjangkauan, Layanan dan tersedianya tempst fasilitas Taman bermain anak di Taman Surawisesa “Kaulinan Barudak” .

Indikator Persentase perempuan di parlemen / DPRD kabupaten Purwakarta dari target 20 persen tercapai 20 persen. Pada pemilu tahun 2019 ada kenaikan jumlah total anggota DPRD Kabupaten Purwakarta menjadi 45 orang terdiri dari 13 orang perempuan dan 32 orang laki laki sehingga quota keterwakilan perempuan di legislatif 28 persen. Hal ini terjadi karena quota 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif tidak tercapai di karenakan banyak faktor yang mempengaruhi untuk menjadi anggota legislatif terutama kebijakan pimpinan parpol. Selain itu budaya patriarki yang menganggap pemimpin itu harus laki-laki dan mayoritas perempuan ada ketergantungan ekonomi pada suaminya.

Indikator Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender pada Kabupaten Purwakarta dengan target 100 persen dan realisasi 80 persen. Upaya yang dilakukan terkait pencapaian cakupan pemahaman Pengarusutamaan Gender yaitu Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pengisian Instrumen PUG pada OPD di pemkab purwakarta secara virtual (tanpa anggaran), Koordinasi/Evaluasi PUG secara virtual tanpa anggaran dan Pembinaan Operator Siga di Kabupaten Purwakarta.

Indikator Persentase kabupaten kota yang mendapat input peningkatan kualitas hidup perempuan di Jawa Barat dengan target 45 persen dan realisasi 45 persen. Upaya ini dilakukan melalui TOT Sekoper Cinta diikuti oleh Fasilitator Perwakilan Kecamatan sebanyak 100 peserta yang berlokasi di Desa cilangkap Babakan cikao, Wisuda sekoper cinta yang diikuti oleh 60 orang, Evaluasi Akhir P2WKSS di Kab/Kota di 1 Kecamatan (bergantian sesuai hasil musyawarah desa), dan Pemberian penghargaan bagi Pelaksana Program P2WKSS.

Dengan kinerja yang terkait dengan permasalahan dalam keluarga dan masa depan generasi penerus, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk

dapat menjalin kerjasama intensif dengan berbagai pihak, baik dari pemerintahan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan lembaga-lembaga masyarakat yang sudah sejak lama terjun ke dalam penanganan kasus-kasus kekerasan serta perdagangan orang. Oleh karena itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya terus melakukan koordinasi berupa pertemuan dan sosialisasi agar setiap pihak dapat bersatu padu bekerja sama dan berbagi peran untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat yang damai, sejahtera dan sehat.

Dalam kinerja keuangan, capaian kinerja dari alokasi Belanja Langsung penunjang kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan sebesar Rp963.875.903,- terealisasi sebesar Rp.866.704.055,- atau 89.91%.

KATA PENGANTAR

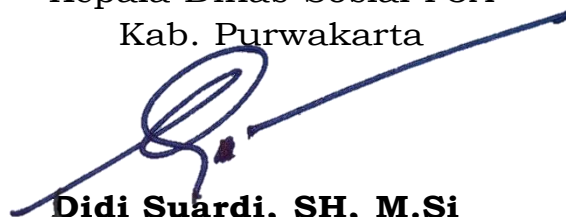
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang bersumber dari dana APBD Provinsi Tahun 2022 telah selesai disusun.

Penyusunan LAKIP Dinsos P3A Kabupaten Purwakarta ini untuk melihat gambaran tentang hasil-hasil yang telah dicapai serta hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan usaha-usaha penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta sebagai pertanggungjawaban administrasi maupun teknis, selanjutnya dijadikan bahan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik pada kegiatan tahun mendatang. Dalam laporan ini menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis yang diukur oleh indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam format rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran RENSTRA, pengukuran kinerja, serta perjanjian kinerja.

Pada Kesempatan ini kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan keberhasilan Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat serta instansi terkait. Segenap kritik, saran dan masukan dari semua pihak dengan semangat kerja sama dan kesatuan langkah, semoga menjadi pemicu untuk terus menerus memperbaiki Kinerja pada tahun berikutnya.

Purwakarta, Februari 2022

Kepala Dinas Sosial P3A
Kab. Purwakarta



Didi Suardi, SH, M.Si

NIP. 19660525 198803 1

008

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Landasan Hukum.....	2
3. Tujuan	4
4. Gambaran Umum.....	4
1.1 Tabel komposisi pegawai ASN	12
1.2 Tabel Perbandingan Anggaran	14
5. Isu-Isu Staregis	14
6. Sistematika Penulisan	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
1. Perencanaan Strategis Sebelum reuiu	17
2. Sasaran Strategis.....	20
2.1 Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi	21
2.2 Tabel Indikator Kinerja Utama	21
3. Perjanjian Kinerja	23
BAB III. PENGUKURAN KINERJA.....	26
1. Pengukuran Kinerja Organisasi	26
3.1 Tabel IKU	28
3.2 Tabel Realisasi Kinerja.....	28
3.3 Tabel Penanganan Mutu Pelayanan	29
3.4 Tabel Data Penanganan urusan Sosial P3A.....	33
3.5 Tabel Penyaluran Bantuan Sosial.....	35
3.6 Tabel Rekapitulasi DTKS	36
3.7 Tabel Capaian Kinerja.....	41

2. Evaluasi dan Analisis	47
3.8. Tabel Realisasi Program dan Kegiatan	58
3.9 Tabel Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 1	63
3.10 Tabel Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 3	70
3.11 Tabel Tingkat Efisiensi Anggaran	77
3.12 Tabel Tingkat Efisiensi Anggaran	77
BAB IV. PENUTUP	79
FOTO FOTO KEGIATAN	



BAB I

2022

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Sistem Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS), dan saat ini telah diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Diharapkan upaya tersebut mampu menurunkan stigma dimasyarakat dan meningkatkan kemampuan PPKS untuk melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, komitmen pembangunan kesejahteraan sosial tersebut telah menjadi prioritas pembangunan tahun 2018 - 2023, dengan strategi meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Memberikan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), melalui sistem di luar panti atau berbasiskan masyarakat/komuniti, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya serta Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan gender dan anak, Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan (Pro Poor), Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial terhadap PPKS dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mengacu kepada:

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

1.3 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2022.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta,
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel.

1.4 GAMBARAN UMUM

A. Kedudukan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 161 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati nomor 103 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 234 tahun 2021 tentang Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- d. Pelaksanaan administrasi urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, diduduki oleh Perencana Ahli muda;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Diduduki oleh Kasubag Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepagawaian dan Umum diduduki oleh Analis SDM Aparatur Ahli Muda .
3. Bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Muda;
 - b. Dua Jabatan Fungsional kosong ahli muda kosong;

- c. Analis mitigasi bencana
 - d. Pengelola Data Bantuan Sosial
 - e. Pengadministrasi Anak Terlantar
 - f. Analis masalah sosial
4. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas;
 - a. Penyuluh Sosial Ahli Muda Sosial;
 - b. Pekerja sosial; dan
 - c. Analis Pelayanan Sosial.
 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Pekerja sosial ahli muda;
 - b. Penyuluh sosial ahli muda; dan
 - c. Satu jabatan fungsional ahli muda kosong .
 6. Bidang perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas;
 - a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 2 orang;
 - b. Satu jabatan fungsional ahli muda kosong

Adapun rincian tugas dari masing-masing jabatan dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. *Kepala Dinas* mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan

Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak;
- e. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

2. *Sekretaris*, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum dengan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
- b. pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

3. *Bidang Bantuan Perlindungan Sosial*, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin dengan rincian fungsi sebagai berikut :

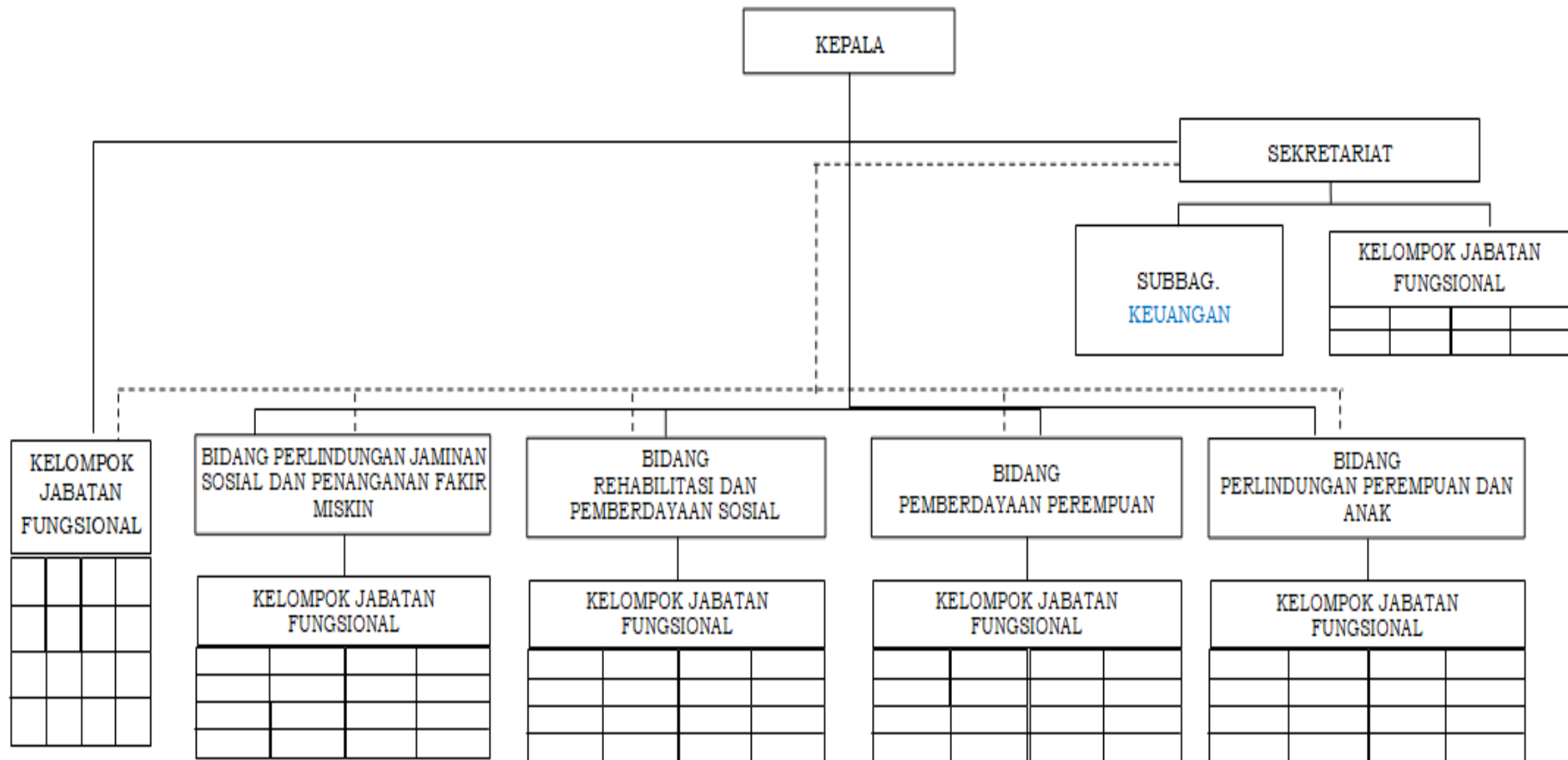
- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
4. *Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial*, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial dengan rincian fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial ;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
5. *Bidang Pemberdayaan Perempuan*, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemberdayaan perempuan yang meliputi kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan pembinaan organisasi perempuan dengan fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;

- b. Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. *Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak*, mempunyai rincian tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan, pelayanan, dan penguatan kelembagaan, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga dengan rincian fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi Kebijakan, program dan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA



Sumber : Peraturan Bupati 234 tahun 2021

D. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta di dukung oleh sumber daya manusia baik ASN maupun Non ASN. Personil pendukung tersebut antara lain:

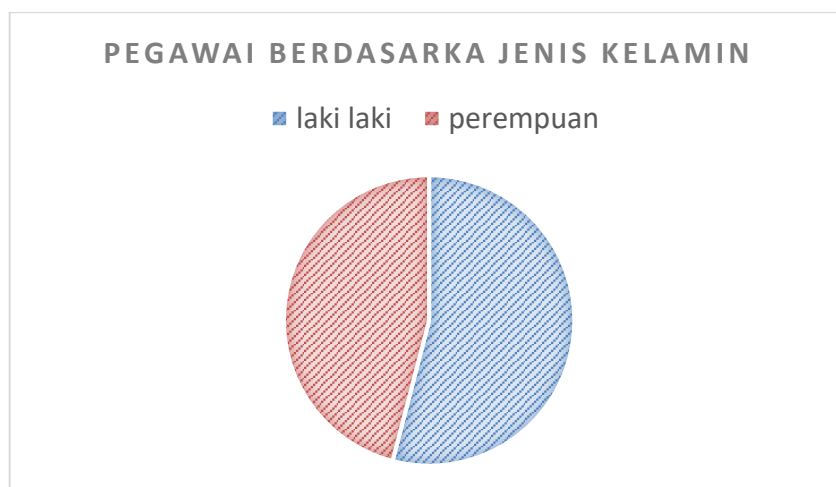
□ Pegawai ASN

Jumlah Pegawai ASN di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada bulan Desember tahun 2022 sebanyak 41 orang, terdiri dari:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai ASN pada DinsosP3A Kab.Purwakarta

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
	Laki-Laki	Perempuan	
Kepala Dinas	1	-	1 orang
Sekretariat	3	5	8 orang
Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	3	3	6 orang
Bidang Rehabilitasi pemberdayaan Sosial	5	2	7 orang
Bidang Pemberdayaan Perempuan	3	2	5 orang
Bidang Perlindungan Anak	3	2	5 orang
Jafung Pensos dan Arsiparis mahir	1	1	2 orang

Dengan rincian pegawai ASN laki-laki sejumlah 19 orang dan pegawai perempuan 15 sejumlah 34 orang.



□ **Non ASN**

Personil pendukung lainnya terdiri dari beberapa unsur atau kelompok antara lain:

Tabel 3. Tenaga Pendukung Non ASN

Tenaga Pendukung	Tahun 2022
PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	2 orang
Pendamping PKH (Program Keluarga harapan)	99 orang
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	21 orang
Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	4 pendamping
TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)	17 orang
Karang Taruna Kabupaten Desa/Kelurahan	1 org (ketua) 192 org
LKSA	33 lembaga
Motifator Ketahanan Keluarga	9 orang
Tim Penyuluhan dan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan anak	3 org

□ **Keuangan**

Perbandingan anggaran belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran

No	Jumlah Anggaran	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Urusan Sosial	2.402.326.872	2.092.087.050
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.342.747.614	963.875.903
3	Sekretariat	7.339.928.094	7.275.865.339
4	Taman Makam Pahlawan (TMP)	127.345.018	200.000.000
Total Anggaran		11.212.347.598	10.531.828.292

Sesuai data Tersebut diatas bahwa Pagu anggaran TA 2022 urusan sosial sebesar Rp2.092.087.050 mengalami penurunan pagu sebesar 680.519.306,- dari tahun 2022.

1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari isu-isu strategis yang sangat perlu di perhatikan, yaitu:

1. Adanya Adanya *inclusion* dan *exclusion error* pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
2. Kecendrungan Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara Kuantitas;
3. Integrasi dan optimalisasi penanganan PPKS antara Pemerintah, dan masyarakat khususnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4. Sumber daya manusia pada tenaga kesejahteraan sosial penyelenggara dan pelaksana penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum memadai;
5. Masih kurangnya partisipasi gender dalam pembangunan;
6. Masih kurangnya kesadaran terhadap perlindungan perempuan dan anak.
7. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya.
8. Relatif rendahnya fasilitasi, penjabaran, penetapan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan system informasi gender dan anak skala Kabupaten (data pilah gender).

a. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 228 tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sistematika yang di anjurkan adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan latar belakang, dan maksud tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, penjelasan umum organisasi serta isu-isu strategis yang sedang dihadapi.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini di uraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

BAB III3 Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan capaian kerja organisasi dengan berbagai analisa serta berisikan pula realisasi anggaran tahun tersebut.

BAB IV. Penutup

Berisikan ringkasan dan kata kata penutup dari kepala perangkat daerah.

LAMPIRAN

Berisikan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan isi laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.



BAB II

2022

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)



2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 78.A tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Purwakarta terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial P3A dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta telah melalui tahapan - tahapan yang simultan

dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1 VISI DAN MISI

Sasaran utama yang ingin dicapai dari perencanaan strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari tugas pokok, kewajiban dan fungsinya sebagai salah satu unsur pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, khususnya pada urusan pemerintah bidang sosial dan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Dengan demikian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mampu menjadi katalisator untuk dapat menggerakkan unsur-unsur teknis sesuai dengan tugas, kewajiban dan fungsi serta kewenangannya.

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta merupakan langkah lanjut untuk mendukung

pencapaian visi Kabupaten Purwakarta. Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan motivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa mendatang.

Visi Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 adalah *“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”*

Visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi. Misi merupakan suatu kemauan yang kuat dari suatu lembaga organisasi dengan memperlihatkan kewenangan dan tanggungjawabnya atas kepentingan umum (publik) guna mewujudkan kondisi dan situasi yang diinginkan pada akhir kurun waktu tertentu yang menyiratkan tujuan-tujuan yang harus dicapai sebagai persyaratan terwujudnya Visi.

Adapun misi yang telah disusun untuk mencapai visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial,**
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional,
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan,
4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat yang Kokoh Berbasis Desa.

Sebagaimana visi dan misi Kabupaten Purwakarta tahun 2018- 2023 yang telah disebutkan diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

kabupaten Purwakarta dalam pembangunan kesejahteraan sosial mendukung pencapaian *Misi pertama*, yaitu Meningkatkan Kuantitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Tujuan ke satu Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, *Sasaran ke 1* Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Remaja.

Penekanan pencapaian misi di titik beratkan pada meningkatnya kesejahteraan sosial di kabupaten purwakarta yang akan diruncingkan dalam sasaran strategis yang disusun oleh dalam Rencana Strategis.

2.2 SASARAN STRATEGIS

Misi Pemerintah tersebut di jabarkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Mengacu pada Misi ke satu yaitu Meningkatkan Kuantitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta merumuskan tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapainya.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Tujuan dan sasaran dari misi kesatu yang menjadi rujukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi Kesatu: Meningkatkan Kuantitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Perempuan, Anak dan Remaja	1. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan, 2. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat yang Berafirmasi Gender, Anak dan remaja

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
A	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	1. Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan fakir miskin dan PMKS 2. Tingkat pemenuhan dukungan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Tingkat Pemenuhan Pembinaan Anak terlantar 4. Tingkat Dukungan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial

B	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	5. Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Pengarusutamaan gender 6. Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 7. Tingkat Pemenuhan Dukungan terhadap Peningkatan peran serta dan Kesenjangan Gender
---	---	--

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, strategi dalam mencapai sasaran tersebut diterjemahkan kedalam program-program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Program dan kegiatan yang dijalankan bersifat strategis. Nilai strategis itu bukan hanya karena berkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Perangkat Daerah, namun juga karena sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program-program Pemerintah. Program sebagai penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan, merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan, dengan demikian program disusun dengan nyata, sistematis, dan terpadu.

Adapun program-program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak

Kekerasan

- 4) Program Rehabilitasi Sosial
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 6) Program Penanganan Bencana
- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 8) Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 9) Program Perlindungan Perempuan
- 10) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 11) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan anak
- 12) Program Pemenuhan hak Anak (PHA)
- 13) Program Perlindungan Khusus anak

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan di capai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan umum disusunnya perjanjian kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat

menggambarkan keberadaan organisasi tersebut serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi.

Untuk itu penyusunan perencanaan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2021 merupakan sasaran dan target yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023, dokumen rencana kinerja Tahunan tahun 2022, dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta selama tahun 2022.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan perangkat daerah di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan tugasnya pada tahun 2022.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintahan.

Perjanjian Kinerja dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian (2022)
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial				
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	8.36	8.19
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86.78	89.71
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75.48	76.47



BAB III

2022

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

BAB III.

PENGUKURAN KINERJA



3.1 PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Bandung
Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Purwakarta
Tahun 2022

No	SASARAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	%	100	100%	128%
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	%	100	100%	100

- Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Kabupaten
Purwakarta Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2022	100	100	100
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2022	100	100	100
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia				

	Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terlantar di Luar Panti Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2022	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2022	100	100	100
5.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2022	100	100	100
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Purwakarta %						100%

Tabel 3.4
Penanganan Mutu Pelayanan Dasar sesuai SPM TA 2022

NO	Uraian	Jumlah Populasi	Sumber dana APBD	Sumber dana APBN	Belum Terlayani	Ket
1.	Penyandang Disabilitas Terlantar	192	5	168 (Kemensos)	19	DTKS

2.	Anak Terlantar	814	814	100	0	DTKS dan Penjakauan
3.	Lansia Terlantar	1.411	-	1.411 (Kemensos)	0	Non DTKS
4.	Korban Bencana dan sosial	679	100	579 APBN (Dir. PSKBA Kemensos RI) dan APBD Provinsi Jawa Barat	0	Usulan dari Desa

Keterangan Penyandang Disabilitas Terlantar :

Data Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar dihitung berdasarkan data dan informasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data real jumlah penerima layanan dasar.

Keterangan Penanganan Anak Terlantar :

- a) Populasi / anak terlantar yang harus dilayani sesuai renstra adalah 481 anak yang perlu untuk dilayani dari segi data dan pengaduan serta 25 anak yang perlu untuk mendapatkan layanan rujukan sehingga total populasi anak terlantar yang harus dilayani berdasarkan Renstra adalah sebanyak 506 anak.
- b) Realisasi penanganan layanan data dan pengaduan anak terlantar sebanyak 814 sedangkan yang diinput di dalam aplikasi E-SPM Bangda 481 (mengikuti target di awal/Renstra). Adapun anak terlantar yang terlayani dengan menggunakan anggaran APBD Purwakarta sebanyak 26 anak sedangkan 788 anak terlantar yang terlayani merupakan yatim piatu yang mendapatkan bantuan uang tunai sejumlah 600rb dari anggaran APBN (Kemensos).
- c) 8 anak dari 26 anak yang dijangkau, dirujuk ke panti / LKSA.

- d) Peningkatan jumlah anak terlantar yang perlu dilayani diakibatkan karena pandemi covid 19 yang mengakibatkan beberapa orang tua yang meninggal sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah anak baik yatim, piatu, maupun yatim piatu.
- e) Perhitungan indikator kinerja berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 untuk kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti adalah sebagai berikut:

$$\frac{X}{Y} \times 100\%$$

X = Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Y = Populasi anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti

X = 814 anak

Y = 506 anak (yang terdata di awal) → Y = 814 anak (populasi tambahan)

Indikator kinerja rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

$$= \frac{814}{814} \times 100\% = 100\%$$

Namun, apabila menggunakan perhitungan indikator dari SPM Bangda adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator 1 (layanan data dan pengaduan)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah yang harus dilayani}}{\text{Jumlah yang terlayani}} \times 100\% \\ &= \frac{481}{481} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

- 2) Indikator 12 (layanan rujukan)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah yang harus dilayani}}{\text{Jumlah yang terlayani}} \times 100\% \\ &= \frac{8}{25} \times 100\% \\ &= 32\% \end{aligned}$$

- 3) Indikator kinerja rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti (aplikasi SPM Bangda)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah yang harus dilayani}}{\text{Jumlah yang terlayani}} \times 100\% \\ &= \frac{481+8}{481+25} \times 100\% \\ &= \frac{489}{506} \times 100\% \\ &= 96,64\% \end{aligned}$$

Keterangan Lansia Terlantar

Data Populasi Lanjut Usia Terlantar (Lansia) Terlantar dihitung berdasarkan data dan informasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data real jumlah penerima layanan dasar

Keterangan Gelandangan Pengemis

Data Populasi Gelandangan dan Pengemis dihitung berdasarkan penjangkauan , penanganan yang dilayani dan dihitung berdasarkan data real jumlah penerima layanan dasar.

Keterangan Penanganan Korban Bencana Sosial :

- a) Populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana sesuai renstra adalah 318 orang yang mendapatkan permakanan, 100 orang yang mendapatkan sandang, 1 lokasi tempat penampungan pengungsi dan 1 lokasi untuk penanganan khusus bagi kelompok rentan. Adapun total populasi awal yang tercatat sebanyak 418.
- b) Untuk kegiatan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang direalisasikan terdiri dari 3 sub kegiatan dimana realisasi didasarkan pada pengajuan yang diajukan oleh Desa / Kelurahan. Untuk anggaran realisasi bersumber dari APBN (Dir. PSKBA Kemensos RI) dan APBD Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk rincian realisasi adalah: Penyaluran permakanan sebanyak 433 (yang diinput di E-SPM Bangda sebanyak 318 mengikuti target awal/renstra), penyaluran sandang sebanyak 115 (yang diinput di E-SPM Bangda sebanyak 100 mengikuti target awal/renstra), dan penanganan khusus bagi kelompok rentan sebanyak 131 dimana yang diberikan adalah permakanan dan sandang khusus anak (yang diinput di E-SPM Bangda adalah 1 lokasi mengikuti target awal/renstra).
- c) Total realisasi kegiatan ini adalah $433+115+131 = 679$.

- d) Perhitungan indikator kinerja berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 untuk kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti adalah sebagai berikut:

$$\frac{X}{Y} \times 100\%$$

Dimana:

X = Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten / kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Y = Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten / kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota

X = 679

Y = 418 (data proyeksi di awal / renstra) → Y = 679 (berdasarkan pengajuan yang terlayani)

Indikator kinerja perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial = $\frac{679}{679} \times 100\% = 100\%$

Namun, apabila menggunakan perhitungan indikator dari SPM Bangda adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator 1 (penyediaan permakanaan)

$$= \frac{\text{Jumlah yang harus dilayani}}{\text{Jumlah yang terlayani}} \times 100\%$$

$$= \frac{318}{318} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Tabel 1.3

Data Penanganan urusan Sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis	Jumlah	ket
1.	Jumlah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (kasus) :		
	a. Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH)	8 orang	Disversi
	b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / seksual	0 orang	
	c. Anak korban kejahatan seksual		
	- Persetubuhan terhadap anak	26 orang	
	- Pencabulan terhadap anak	5 orang	
	- Pelecehan seksual	14 orang	

1.	d. Anak Korban Kekerasan fisik / psikis - Penganiayaan terhadap anak - Kekerasan psikis e. Anak Korban Penelantaran f. Anak Berprilaku Sosial menyimpang g. Anak korban stigmatisasi pelabelan i. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) j. Anak korban Penyalahgunaan Nafza	13 orang 12 orang 4 orang 4 orang 1 orang 13 orang 13 orang 1 orang	Disversi
2.	Jumlah kader PKK	11549 orang	
3.	Jumlah UMKM Perempuan	2.343 orang	
4.	Kelompok Binaan PKK	6.615 orang	
5.	Kelompok PKK-Dasawisma	8.437 orang	
6.	Kelompok PKK-RT	4.552 orang	
7.	Kelompok PKK-RW	1.473 orang	
8.	Kelompok PKK-Dusun/Lingkungan	590 orang	
10.	Jumlah pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	ODGJ = 40 Orang Disabilitas terlantar = 173 org Lansia Terlantar = 1.411 org Orang terlantar = 117 orang Gelandangan pengemis 40 orang Eks PSK = 70 orang	Populasi ODGJ 400 org Populasi Disabilitas terlantar 192 org Populasi Lansia terlantar 1.411 org Populasi OT = 117 org Populasi gepeng 45 org Populasi Eks Psk = 70 org
11.	Jumlah anak terlantar yang dibina (orang)	814 orang	Populasi 814 Orang sbb : 26 org dari pengaduan 788 anak terlantar yang terlayani merupakan yatim piatu yang mendapat bantuan dari APBN Kemensos
12.	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (yayasan)	33 Lembaga	

Tabel 3.5
Penyaluran Bantuan Sosial TA 2022
 Rekapitulasi Penanganan Bantuan Sosial TA 2022

Jenis Bantuan Sosial	Jml Penerima	Kec
BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	75.783 Keluarga dari Kemensos	17 Kec
PKH	29.527 Keluarga dari Kemensos	17 Kec
BLT Tambahan	105.310 Keluarga dari Kemensos	17 Kec
Bantuan Adaptif	Atensi : 109 org Bantuan lanjut usia terlantar dari Kemensos Atensi : 392 orang Bantuan Atensi (Asesmen Terintegrasi) untuk disabilitas dari Kemensos YAPI (Yatim Piatu) 788 Kemensos, 26 orang APBD Permakanan Lansia : 1301 KPM Permakanan Disabilitas : 168	17 Kec
RST Tahun 2022	1 KK	Kec. Sukatani
Bantuan Sosial Bencana : Santunan kematian	1 orang	Kec. Bojong
BTT Sosial : (Bantuan Operasional Pengobatan)	4 orang	Kec. Sukatani, Kec. Tegalwaru, Kec. Darangdan, Kec. Plered

3.6 Tabel Rekapitulasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Tahun 2021 dan 2022

REKAPITULASI DTKS TAHUN 2021 DAN 2022			
KEC	DESA	DTKS TAHUN 2021	DTKS TAHUN 2022
PURWAKARTA	NAGRI KIDUL	4.778	4.806
	NAGRI KALER	6.863	6.803
	NAGRI TENGAH	3.457	3.578
	SINDANGKASIH	9.578	10.109
	CIPAISAN	4.351	5.019
	PURWAMEKAR	4.529	4.564
	CISEUREUH	7.461	7.728
	TEGALMUNJUL	6.794	7.072
	MUNJULJAYA	5.800	5.832
	CITALANG	2.685	3.162
CAMPAKA	CAMPAKA	1.442	1.468
	CAMPAKASARI	1.756	1.774
	BENTENG	2.159	2.184
	CIRENDE	1.334	1.332
	CIKUMPAY	3.457	3.617
	CIJAYA	2.103	2.110
	KERTAMUKTI	1.688	1.692
	CIMAH	2.381	2.380
	CIJUNTI	2.635	2.621
	CISAAT	3.605	3.666
JATILUHUR	CIKAOBANDUNG	2.460	2.460
	JATIMEKAR	2.297	2.268
	JATILUHUR	2.899	2.890
	CILEGONG	2.916	2.948
	KEMBANGKUNING	3.736	3.781
	CIBINONG	2.874	3.073
	BUNDER	4.916	4.927
	MEKARGALIH	3.940	3.974
	CISALADA	4.957	5.016
	PARAKANLIMA	5.330	5.403
PLERED	PLERED	3.015	2.987
	PALINGGIHAN	3.564	3.534
	CIBOGOHIR	5.591	5.547
	LINGARSARI	3.785	3.798
	GANDASOLI	3.470	3.561
	CITEKO	4.006	3.916
	LIUNGGUNUNG	5.615	5.552

	RAWASARI	3.107	3.103
	ANJUN	3.186	3.112
	SINDANGSARI	3.639	3.542
	BABAKANSARI	2.777	2.734
	GANDAMEKAR	3.427	3.395
	CITEKOKALER	3.500	3.511
	PAMOYANAN	3.748	3.749
	SEMPUR	4.546	4.535
	CIBOGO GIRANG	6.567	6.536
SUKATANI	SUKATANI	4.870	4.902
	MALANGNENGAH	2.378	2.411
	CILALAWI	2.805	2.821
	SUKAMAJU	2.403	2.464
	CIPICUNG	2.308	2.353
	CIANTING UTARA	1.500	1.731
	CIANTING	3.792	3.796
	PASIRMUNJUL	2.546	2.579
	TAJURSINDANG	3.488	3.554
	CIBODAS	3.470	3.420
	CIJANTUNG	2.615	2.624
	SUKAJAYA	3.128	3.154
	PANYINDANGAN	4.609	4.564
	SINDANGLAYA	2.839	2.830
DARANGDAN	DARANGDAN	4.899	4.857
	DEPOK	3.476	3.457
	CILINGGA	3.245	3.248
	NANGEWER	4.243	4.165
	MEKARSARI	2.479	2.505
	LINGGASARI	2.290	2.297
	SAWIT	1.982	1.971
	LINGGAMUKTI	1.787	1.764
	GUNUNGHEJO	3.250	3.180
	PASIRANGIN	4.319	4.306
	LEGOKSARI	1.626	1.641
	SIRNAMANAH	1.680	1.667
	SADARKARYA	1.503	1.590
	NEGLASARI	2.670	2.684
	NAGRAK	5.294	5.265
MANIIS	GUNUNGKARUNG	3.781	3.793
	CITAMIANG	3.617	3.722
	SINARGALIH	5.366	5.461
	TEGALDATAR	5.550	5.516
	CIJATI	2.090	2.113
	CIRAMAHLIR	3.314	3.309

	SUKAMUKTI	2.938	2.918
	PASIRJAMBU	3.880	3.851
TEGALWARU	BATUTUMPANG	3.328	3.307
	CITALANG	3.441	3.494
	TEGALWARU	2.595	2.583
	TEGALSARI	2.068	2.053
	WARUNGJERUK	4.259	4.220
	GALUMPIT	2.673	2.654
	SUKAHAJI	2.138	2.120
	KAROYA	3.019	3.016
	CADASSARI	2.352	2.357
	CADASMEKAR	3.058	3.017
	CISARUA	3.657	3.645
	SUKAMULYA	3.817	3.769
	PASANGGRAHAN	3.309	3.273
WANAYASA	WANAYASA	2.457	2.377
	SUKADAMI	2.329	2.411
	WANASARI	2.478	2.459
	SIMPANG	1.593	1.552
	NAGROG	1.801	1.828
	CIBUNTU	1.412	1.495
	BABAKAN	1.988	1.968
	NANGERANG	1.798	1.785
	CIAWI	2.362	2.330
	SUMURUGUL	1.402	1.370
	RAHARJA	1.165	1.148
	SAKAMBANG	1.260	1.264
	TARINGGUL TONGGOH	2.738	2.743
	LEGOK HUNI	2.446	2.410
	TARINGGUL TENGAH	3.011	3.056
PASAWAHAN	PASAWAHANANYAR	1.626	1.630
	PASAWAHAN	3.337	3.414
	SAWAHKULON	2.901	2.875
	CIHERANG	3.581	3.586
	CIDAHU	1.170	1.199
	PASAWAHANKIDUL	2.651	2.642
	KERTAJAYA	2.519	2.523
	LEBAKANYAR	2.501	2.457
	SELAAWI	1.984	1.996
	MARGASARI	2.879	2.870
	WARUNGKADU	2.225	2.197
	CIHUNI	2.551	2.559
BOJONG	BOJONG BARAT	2.466	2.426
	BOJONG TIMUR	3.814	3.826

	CIKERIS	1.769	1.744
	CIHANJAWAR	2.112	2.091
	CIPEUNDEUY	3.239	3.232
	CILEUNCA	3.189	3.135
	CIBINGBIN	4.543	4.512
	KERTASARI	4.093	4.063
	PANGKALAN	1.669	1.673
	PAWENANG	2.060	2.079
	SUKAMANAH	2.210	2.240
	SINDANGPANON	3.737	3.832
	SINDANGSARI	2.711	2.772
	PASANGGRAHAN	1.845	1.839
BABAKANCIKAO	CILANGKAP	2.133	2.170
	CICADAS	2.079	2.076
	HEGARMANAH	1.721	1.711
	BABAKANCIKAO	1.600	1.609
	KADUMEKAR	905	970
	MARACANG	2.556	2.550
	CIWARENG	2.863	2.989
	MULYAMEKAR	2.650	2.677
	CIGELAM	3.138	3.115
BUNGURSARI	CIWANGI	3.137	3.096
	CIBENING	1.988	2.190
	BUNGURSARI	1.743	1.791
	DANGDEUR	1.292	1.388
	CIBUNGUR	2.098	2.114
	WANAKERTA	1.931	1.918
	CINANGKA	1.466	1.441
	CIKOPO	2.507	2.542
	CIBODAS	2.481	2.494
	KARANGMUKTI	2.286	2.252
CIBATU	CIBATU	1.619	1.714
	CILANDAK	2.403	2.493
	KARYAMEKAR	2.388	2.349
	CIPINANG	2.713	2.682
	CIPARUNGSARI	1.168	1.147
	CIRANGKONG	2.290	2.241
	CIKADU	1.448	1.447
	CIBUKAMANAH	1.416	1.432
	WANAWALI	856	841
	CIPANCUR	1.173	1.164
SUKASARI	KUTAMANAH	3.181	3.191
	KERTAMANAH	1.721	1.730
	CIRIRIP	2.877	2.872

	SUKASARI	2.646	2.610
	PARUNGBANTENG	2.216	2.238
PONDOKSALAM	PARAKANSALAM	989	989
	PONDOKBUNGUR	1.677	1.672
	SALEM	2.346	2.321
	GALUDRA	1.211	1.209
	TANJUNGSARI	3.784	3.766
	SALAMMULYA	1.874	1.863
	SALAMJAYA	2.347	2.346
	BUNGURJAYA	1.219	1.204
	GURUDUG	2.223	2.201
	SUKAJADI	1.907	1.887
	SITU	1.885	1.856
KIARAPEDES	KARANGPEDAS	1.624	1.612
	CIRACAS	2.125	2.073
	PARAKANGAROKGEK	2.196	2.171
	TARINGGUL LANDEUH	1.867	1.845
	MEKARJAYA	2.308	2.272
	MARGALUYU	1.919	2.131
	GARDU	1.791	1.799
	CIBEBER	1.847	1.847
	PUSAKAMULYA	3.372	3.372
	SUMBERSARI	1.663	1.643
JUMLAH		553.684	552.291

Tabel 3.7 Capaian Kinerja

Program/ Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Parsial I (Rp.)	Pagu Parsial III (Rp.)	Target Kinerja	Realisasi Kinereja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.275.865.339	7.275.865.339	7.275.865.339		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.930.650	22.930.650	22.930.650		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.705.300	8.705.300	8.705.300		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4.671.000	4.671.000	4.671.000	1 dok	1 dok
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.831.300	3.831.300	3.831.300	1 dok	1 dok
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.723.050	5.723.050	5.723.050	1 dok	1 dok
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.187.229.089	6.187.229.089	6.187.229.089		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.170.288.039	6.170.288.039	6.170.288.039	43 org	43 org
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.941.050	16.941.050	16.941.050	1 dok	1 dok
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.011.300	4.011.300	4.011.300		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.011.300	4.011.300	4.011.300	98 dok	98 dok
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.395.550	39.395.550	39.395.550		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39.395.550	39.395.550	39.395.550	2 dok 150 org	2 dok 150 org
Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.785.250	202.785.250	202.785.250		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.988.550	19.988.550	19.988.550	18 item	18 item
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.179.550	24.179.550	24.179.550	22 jenis	22 jenis
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.998.350	49.998.350	49.998.350	47 item	47 item

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.200	29.999.200	29.999.200	10098	10098
Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	20.000.000	490	490
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.505.000	50.505.000	50.505.000	53 OH, 113H	53 OH, 113H
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.114.600	8.114.600	8.114.600	1 dok	1 dok
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.538.050	86.538.050	86.538.050		
Pengadaan Mebel	29.552.450	29.552.450	29.552.450	4 item	4 item
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.985.600	56.985.600	56.985.600	2 jenis	2 jeni
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.415.450	562.415.450	562.415.450		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.105.050	95.105.050	95.105.050	6 jenis	6 jenis
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.310.400	467.310.400	467.310.400	33 org	33 org
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.560.000	170.560.000	170.560.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.600.000	71.600.000	71.600.000	12 unit	12 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.960.000	69.960.000	69.960.000	2 unit	2 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.000.000	29.000.000	29.000.000	2 unit	2 unit
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	166.675.250	166.675.250	166.675.250		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	166.675.250	166.675.250	166.675.250		
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.444.700	18.444.700	18.444.700	30 lembaga	30 lembaga
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	148.230.550	148.230.550	148.230.550	21 LKSA	21 LKSA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	733.045.800	733.045.800	733.045.800		

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	627.424.250	627.424.250	627.424.250		
Penyediaan Permakanan	180.046.200	180.046.200	180.046.200	50 org	50 org
Penyediaan Sandang	110.523.900	110.523.900	110.523.900	200 org	200 org
Penyediaan Alat Bantu	131.995.450	131.995.450	131.995.450	49 org	49 org
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50.018.350	50.018.350	50.018.350	20 org	20 org
Pemberian Layanan Kedaruratan	74.896.950	74.896.950	74.896.950	75 org	75 org
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	79.943.400	79.943.400	79.943.400	50 org	50 org
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	105.621.550	105.621.550	105.621.550		
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	33.164.750	33.164.750	33.164.750	17 org	17 org
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	72.456.800	72.456.800	72.456.800	70 org	70 org
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.076.310.050	1.076.310.050	1.076.310.050		
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	37.945.350	37.945.350	37.945.350		
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	22.344.250	22.344.250	22.344.250	25 org	25 org
Rujukan Anak-Anak Terlantar	6.601.200	6.601.200	6.601.200	40 LKSA	40 LKSA
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	8.999.900	8.999.900	8.999.900		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.038.364.700	1.038.364.700	1.038.364.700		
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	107.947.100	107.947.100	107.947.100	1 dok	1 dok
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	37.654.600	37.654.600	37.654.600	1 dok	1 dok
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	861.296.950	861.296.950	861.296.950	115 org 26391 KK 24 Buku	115 org 26391 KK 24 Buku
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	31.466.050	31.466.050	31.466.050	25 org	25 org

PROGRAM PENANGANAN BENCANA	116.055.950	116.055.950	116.055.950		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	50.776.200	50.776.200	50.776.200	1 lokasi	1 lokasi
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	32.840.400	32.840.400	32.840.400	1 lokasi	1 lokasi
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	17.935.800	17.935.800	17.935.800	1 lokasi	1 lokasi
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	65.279.750	65.279.750	65.279.750		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	11.111.450	11.111.450	11.111.450	1 item	1 item
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	54.168.300	54.168.300	54.168.300	21 org	21 org
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	200.000.000	4 Ha	4 Ha
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	185.845.900	185.845.900	185.845.900		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	43.136.850	43.136.850	43.136.850		
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	43.136.850	43.136.850	43.136.850	50 org	50 org
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	74.338.550	74.338.550	74.338.550		
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	74.338.550	74.338.550	74.338.550	120 org	120 org
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.370.500	68.370.500	68.370.500		
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.370.500	68.370.500	68.370.500	25 organisasi	25 organisasi
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	266.600.948	266.600.948	326.600.948		

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	180.394.000	180.394.000	240.394.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	41.800.000	41.800.000	41.800.000	100 org	100 org
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	138.594.000	138.594.000	198.594.000	10 org	10 org
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	44.660.898	44.660.898	44.660.898		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.900.000	25.900.000	25.900.000	50 org	50 org
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.760.898	18.760.898	18.760.898	2 keg	2 keg
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.546.050	41.546.050	41.546.050		
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	41.546.050	41.546.050	41.546.050	100 org	100 org
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	204.667.950	204.667.950	204.667.950		
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.471.450	101.471.450	101.471.450		
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	101.471.450	101.471.450	101.471.450	20 org	20 org
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.196.500	103.196.500	103.196.500		
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.196.500	103.196.500	103.196.500	100 kk	100 kk
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	57.303.900	57.303.900	57.303.900		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.303.900	57.303.900	57.303.900		

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	57.303.900	57.303.900	57.303.900	30 org	30 org
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	165.766.505	165.766.505	165.766.505		
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	22.306.505	22.306.505	22.306.505		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	22.306.505	22.306.505	22.306.505	1 dok	1 dok
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	143.460.000	143.460.000	143.460.000		
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	143.460.000	143.460.000	143.460.000	50 org	50 org
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	23.690.700	23.690.700	23.690.700		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.690.700	23.690.700	23.690.700		
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.690.700	23.690.700	23.690.700	6 lokasi	6 lokasi
TOTAL	10.471.828.292	10.471.828.292	10.531.828.292		

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2022 menggunakan metode yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencpaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 melalui indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2021.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

- **URUSAN SOSIAL**

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan untuk urusan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2021 adalah:

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan ini pada tahun anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp166.675.250,- dengan realisasi, anggaran sebesar Rp166.463.150,- atau sebesar 99.9%.

Alokasi anggaran pada program ini digunakan untuk membiayai beberapa sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp18.444.700,-. Dan terrealisasi Rp18.427.600,- atau sebesar 99.91% Hasil sub kegiatan ini adalah Tersedianya SDM pekerja sosial yang handal.
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp148.230.550 terrealisasi Rp148.035.550,- atau sebesar 99,87%

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp627.424.250,- dan realisasi Rp622.955.200,- atau sebesar 99,3% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Permakanan
anggaran sebesar Rp180.046.200,- dan terrealisasi sebesar



Rp179.982.000,- atau 99.9%. Hasil kegiatan ini

adalah tertanganinya masalah pelayanan bantuan permakanaan.

2. Penyediaan sandang anggaran sebesar Rp110.523.900,- dan terealisasi sebesar Rp110.523.900,- atau 100%, hasil dari sub kegiatan ini tersedianya pelayanan pemberian bantuan sandang bagi PSKS.
3. Penyediaan alat bantu dengan anggaran sebesar Rp131.995.450,- dan terrealisasi Rp131.652.450,- atau sebesar 99.74% Hasil sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya alat bantu penyandang disabilitas.
4. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, dengan anggaran sebesar Rp50.018.350,- dan terealisasi sebesar Rp50.018.350,- atau 100%. Hasil sub kegiatan ini adalah fasilitasi pengembangan dan pemulihan fungsi sosial.
5. Pemberian layanan kedaruratan, dengan anggaran sebesar Rp74.896.950,- dan terealisasi sebesar Rp71.876.500,- atau 95.97%.



Hasil kegiatan ini adalah penanganan korban pasca bencana.

6. Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga, dengan anggaran sebesar Rp79.943.400,- dan terealisasi sebesar Rp78.902.000,- atau 98.7%. Hasil kegiatan ini adalah terfasilitasinya penelusuran keluarga bagi Orang terlantar .

- **Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp105.621.550,- dan realisasi Rp104.582.250,- atau sebesar 99,01% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:**
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, dengan anggaran sebesar Rp33.164.750,- terealisasi sebesar Rp33.164.750,00 atau 100%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pemutakhiran data /DTKS.
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dan terealisasi sebesar Rp72.456.800,- dan terealisasi Rp71.417.500,- atau sebesar 98.57%, hasil dari sub kegiatan ini yaitu penanganan, pembinaan keluarga PMKS.
- **Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp37.945.350,- dan realisasi Rp35.003.400,- atau sebesar 92,24% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:**
 - Sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar dengan anggaran sebesar Rp 22.344.250,- dan terealisasi sebesar Rp19.909.700,- atau 89.1 %. Hasil kegiatan ini adalah terfasilitasinya penjangkauan /penjaringan terhadap anak jalanan
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar dengan anggaran sebesar Rp 6.601.200 dan terealisasi sebesar Rp

6.597.600,- atau 99.95%. Hasil kegiatan ini adalah peanganan, pembinaan dan pemberian rekomendasi terhadap anak terlantar ke LKSA .

- Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak dengan anggaran sebesar Rp8.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp8.496.100,-

atau 94.4%. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi ke LKSA .



- **Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.038.364.700,- dan realisasi Rp 1.022.592.150.,- atau sebesar 99,18% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:**

- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp107.947.100,- dan terealisasi sebesar Rp107,782.000,- atau 99,85%.

Hasil kegiatan



ini adalah tersedianya updating data fakir miskin PPKS.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 37.654.600,- dan terealisasi sebesar Rp32.646.850,- atau 86,7%.

Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan

verifikasi data PBI JKN.

- **Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 50.40.1850,- dan realisasi Rp 50.556.700,- sebesar 99,89% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:**
 - Sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dengan anggaran sebesar Rp 32.840.400,- dan terealisasi sebesar Rp 32.804.200 atau 99,79%, hasil dari sub kegiatan ini adalah tersedianya tempat penampungan pengungsi.
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan anggaran sebesar Rp 17.935.800,- dan terealisasi sebesar Rp 17.752.500,- atau 98,98%. Hasil dari sub kegiatan ini adalah penanganan kebutuhan bagi kelompok rentan.
- **Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 50.776.200,- dan terealisasi sebesar Rp 50.556.700,- atau 99,9% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:**
 - Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dengan anggaran sebesar Rp 11.111.450,- dan terealisasi sebesar Rp 11.108.000,- atau 99,97% hasil dari sub kegiatan ini adalah tersedianya tempat penampungan korban pasca bencana.
 - Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Rp 54.168.300,- dan terealisasi sebesar Rp 53.338.500,- atau 98,47% hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kinerja TAGANA, TKSK, dan relawan sosial.

- **URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

A. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 43.136.850,- dan terealisasi sebesar Rp 39.136.850,- atau 90,73% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG anggaran sebesar Rp 43.136.850,- dan terealisasi sebesar Rp39.136.850,- atau 90,73% Hasil dari sub kegiatan ini anggaran Rencana gender

B. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp74.338.550 ,- dan terealisasi sebesar Rp 56.403.550,- atau 75.87% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi anggaran sebesar Rp 74.338.550,00 dan terealisasi sebesar Rp56.403.550,- atau 75.87% hasil dari kegiatan ini yaitu sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

C. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 68.370.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 66.015.850,00 atau 96.56% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 68.370.500,- dan terealisasi sebesar Rp 66.015.850,- atau sebesar 96.56%.

D. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp240.394.000,- dan terealisasi sebesar Rp227.272.400,- atau 94.54% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp41.800.000,- terealisasi Rp35.565.400,- atau sebesar 85.08% hasil yang pada sub kegiatan ini adalah Sosialisasi pencegahan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak
2. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 198.594.000,- terealisasi Rp191.707.000,- atau sebesar 96,53% hasil dari sub kegiatan ini adalah sosialisasi dan pembinaan

E. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 44.660.898,- dan terealisasi sebesar Rp 44.205.500,00 atau 98.98% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 25.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp 25.894.800,- atau

sebesar 99.98%

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 18.760.898,- dan terealisasi sebesar Rp18.310.700 atau 97.6 % hasil dari sub kegiatan ini adalah layanan bagi perempuan korban kekerasan

F. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 101.471.450,- dan terealisasi sebesar Rp 97.792.450,00 atau 96.37% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 101.471.450,- terealisasi sebesar Rp97.792.450,- atau sebesar Rp96.37%.

G. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 103.196.500,00 dan terealisasi sebesar Rp59.826.500,00 atau 57.97% sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp 103.196.500,- dan terealisasi sebesar Rp 59.826.500,- atau sebesar 57.97% hasil kegiatan sub kegiatan ini P2WKSS.

H. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp57.303.900,00 terealisasi sebesar Rp Rp51.572.200,00 atau 90% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp57.303.900,- dan terealisasi sebesar Rp51.572.200,- atau sebesar 90% hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data gender dan anak.

I. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp dan terealisasi sebesar Rp,-

1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran Sebesar Rp 22.306.505 dan realisasi sebesar Rp22.106.505 atau 99,1%

J. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 143.460.000,-- dan terealisasi sebesar Rp 137.555.000,- atau 99.1% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp Rp143.460.000,- dan terealisasi sebesar Rp137.555.000,- atau sebesar 95.88%.

K. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 23.690.700,- dan terealisasi sebesar Rp23.471.200,- atau 99.07% beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp23.690.700,- dan terealisasi sebesar Rp 23.471.200,- atau sebesar Rp99.07%

Faktor Penghambat dan Solusi Pemecahan masalah

Sebagaimana diketahui bahwa pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi Pandemi Covid-19 di seluruh kota di Indonesia, yang berdampak pada penurunan kegiatan-kegiatan perekonomian dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat di ruang public. Hal ini tentunya sangat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, sebagaimana berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Purwakarta bahwa pada Tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan Kabupaten Purwakarta masih mengalami peningkatan yakni pada angka 8.27% (Tahun 2020) dan 8.83% (Tahun 2021).

- Belum maksimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar terhadap sasaran SPM
- **Solusi Pemecahan**
 - Memaksimalkan segala potensi yang dimiliki Dinas, sehingga target bisa tercapai
 - Mengusulkan adanya penambahan anggaran dan SDM untuk pencapaian SPM Bidang Sosial.
 - Melakukan pendataan berjenjang dan holistik sesuai dengan konsep pendataan kemensos.
 - Sinkronisasi data terpadu (Single data use) dan perubahan indikator yang terukur dan saling keterkaitan.

- Menyusun perencanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien sehingga berdampak terhadap kinerja SKPD

2.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta besaran alokasi sebesar Rp.11.168.170.668,- (Sebelas Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi belanja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada akhir tahun sebesar Rp.10.531.828.292,- (Sepuluh Miliar Lima ratus Tiga Puluh Satu Juta delapan Ratus dua puluh delapan ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8

Tabel Realisasi Program dan Kegiatan 2022

Program	Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
				Total	%	
0.00 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0.00 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.705.300,00	8.284.300,00	95,16	421.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.671.000,00	4.471.000,00	95,72	200.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.831.300,00	3.631.300,00	94,78	200.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.723.050,00	5.373.050,00	93,88	350.000,00
	0.00 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.170.288.039,00	4.914.507.249,00	79,65	1.255.780.790,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.941.050,00	16.941.050,00	100	0
	0.00 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.011.300,00	4.010.550,00	99,98	750
	0.00 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 1.2.05 Administrasi	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39.395.550,00	39.295.550,00	99,75	100.000,00

	Kepegawaian Perangkat Daerah					
	0.00 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.988.550,00	19.988.550,00	100	0
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.179.550,00	24.179.550,00	100	0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.998.350,00	49.973.200,00	99,95	25.150,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.200,00	28.741.600,00	95,81	1.257.600,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	19.980.000,00	99,9	20.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.505.000,00	28.359.994,00	56,15	22.145.006,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.114.600,00	7.854.600,00	96,8	260.000,00
	0.00 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	29.552.450,00	29.476.000,00	99,74	76.450,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.985.600,00	56.800.000,00	99,67	185.600,00
	0.00 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.105.050,00	81.642.479,00	85,84	13.462.571,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.310.400,00	439.621.276,00	94,07	27.689.124,00
	0.00 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.600.000,00	64.775.900,00	90,47	6.824.100,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.960.000,00	69.459.000,00	99,28	501.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.000.000,00	29.000.000,00	100	0
1.06 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 2.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.444.700,00	18.427.600,00	99,91	17.100,00
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	148.230.550,00	148.035.550,00	99,87	195.000,00
1.06 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 4.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	180.046.200,00	179.982.000,00	99,96	64.200,00
		Penyediaan Sandang	110.523.900,00	110.523.900,00	100	0
		Penyediaan Alat Bantu	131.995.450,00	131.652.450,00	99,74	343.000,00
		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50.018.350,00	50.018.350,00	100	0
		Pemberian Layanan Kedaruratan	74.896.950,00	71.876.500,00	95,97	3.020.450,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	79.943.400,00	78.902.000,00	98,7	1.041.400,00
	1.06 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 4.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	33.164.750,00	33.164.750,00	100	0
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	72.456.800,00	71.417.500,00	98,57	1.039.300,00

	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				
1.06 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 5.2.01 Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	22.344.250,00	19.909.700,00	89,1	2.434.550,0 0
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	6.601.200,00	6.597.600,00	99,95	3.600,00
		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	8.999.900,00	8.496.100,00	94,4	503.800,00
	1.06 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 5.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	107.947.100,00	107.782.000,00	99,85	165.100,00
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	37.654.600,00	32.646.850,00	86,7	5.007.750,0 0
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	861.296.950,00	850.736.600,00	98,77	10.560.350, 00
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	31.466.050,00	31.426.700,00	99,87	39.350,00
1.06 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 6.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	32.840.400,00	32.804.200,00	99,89	36.200,00
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	17.935.800,00	17.752.500,00	98,98	183.300,00
	1.06 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 6.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	11.111.450,00	11.108.000,00	99,97	3.450,00
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	54.168.300,00	53.338.500,00	98,47	829.800,00
1.06 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 7.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	100	0
2.08 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 2 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 2.2.01 Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	43.136.850,00	39.136.850,00	90,73	4.000.000,0 0
	2.08 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 2.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	74.338.550,00	56.403.550,00	75,87	17.935.000, 00
	2.08 . 1-06.2-08.0- 00.09.0.0 . 2.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.370.500,00	66.015.850,00	96,56	2.354.650,0 0

	Kewenangan Kabupaten/Kota					
2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 3.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	41.800.000,00	35.565.400,00	85,08	6.234.600,00
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	198.594.000,00	191.707.000,00	96,53	6.887.000,00
	2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 3.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.900.000,00	25.894.800,00	99,98	5.200,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.760.898,00	18.310.700,00	97,6	450.198,00
	2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.546.050,00	41.346.050,00	99,52	200.000,00
2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 4.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	101.471.450,00	97.792.450,00	96,37	3.679.000,00
	2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.196.500,00	59.826.500,00	57,97	43.370.000,00
2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 5.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	57.303.900,00	51.572.200,00	90	5.731.700,00
2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 6.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah,	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	22.306.505,00	22.106.505,00	99,1	200.000,00

	dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 6.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	143.460.000,00	137.555.000,00	95,88	5.905.000,00
2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08 . 1-06.2-08.0-00.09.0.0 . 7.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.690.700,00	23.471.200,00	99,07	219.500,00

Apabila kita membandingkan antara Capaian Kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada sasaran ke-3 maka kita dapat melihat tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja pada Sasaran 3 yaitu sebesar 34,83% sementara tingkat efektifitasnya sebesar 142,49%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Program dan kegiatan Penunjang pada urusan Sosial pada sasaran ke 1 meningkatkan penanggulangan kemiskinan

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dibina	Lembaga	30.00	30.00	166,675,250	166,463,150	99.87			
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1		166,675,250	166,463,150	99.87			
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pendataan	Orang	19	19	18,444,700	18,427,600	99.91	belum tersedianya SLRT sistem layanan rujukan terpadu dan puskesmas	Mengusulkan Pemindahan Aset Provinsi Jabar yang berlatar di desa ciwareng berupa Rumah singgah untuk dijadikan SLRT	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mengikuti kegiatan	LKSA	21	21	148,230,550	148,035,550	99.87	-	-	
	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	85.00	94.23	776,876,862	769,391,550	99.04			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1	93.57	627,424,250	622,955,200	99.29			
		Penyediaan Permakanan	Penanganan Disabilitas; Pemberian bantuan kepada Lansia usia produktif terlantar, pemberian Bantuan LKS	Penangan Disabilitas = 50 org Lansia terlantar = 200 org LKS = 2 lembaga	252	252	180,046,200	179,982,000	99.96	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar , lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis unpredictable sehingga kesulitan dalam menganalisa jenis permakanan	unpredictable, satuan berupa paket pada SIPD tidak usah di rinci komponen belanja	

		Penyediaan Sandang	Jumlah penanganan gelandangan dan pengemis; penanganan lansia, penanganan ODGJ, Pemulung	40 orang	45	45	110,523,900	110,523,900	100.00	Bantuan belum sesuai karena pandemi sehingga data populasi meningkat	mengusulkan bantuan CSR atau baznas	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas	orang	49	49	131,995,450	131,652,450	99.74	penyediaan alat bantu tidak berbanding lurus dengan populasi	menmgusulkan pada tim TAPD untuk menambah item alat bantu dan kuantiti pada SIPD	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak berkebutuhan khusus	orang	20	20	50,018,350	50,018,350	100.00	-	-	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	orang terlanar yang menerima fasilitas perlindungan dan jaminan sosial bagi orang terlanar	orang	75	75	74,896,950	71,876,500	95.97	Belum tersedianya call center, Fasilitas Ambulance, Mobil khusus ODGJ (kemungkinan mengamuk) sehingga pelayanan kurang Optimal	Mengusulkan pengadaan call center, fasilitas ambulance, mobil ODGJ	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah ODGJ	orang	50	50	79,943,400	78,902,000	98.70	-	-	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					149,452,612	146,436,350	97.98			
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah TKSK, PSM dan relawan sosial yang terlibat dalam kegiatan Pemuktahiran Data PMKS	orang	17	17	33,164,750	33,164,750	100.00	-	-	

		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Ex Pekerja Sex Komersial; Jumlah peserta penanganan penyakit sosial dan masalah kesejahteraan sosial lainnya	org	70	70	116,287,862	113,271,600	97.41	-	-	
	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak Terlantar Yang Dibina	Persen	20.00	206.00	1,076,310,050	1,039,595,550	99.12	-	-	
			Persentase Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Diberdayakan	Persen	90.00	87.00						
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					37,945,350	17,003,400	44.81			
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dijangkau	org	25	25	22,344,250	1,909,700	8.55	-	-	
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah LKSA yang melaksanakan Pemeliharaan anak terlantar	org	25	25	6,601,200	6,597,600	99.95	-	-	
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah LKSA yang melaksanakan Layanan Kepada Anak Terlantar	LKSA	40	40	8,999,900	8,496,100	94.40	-	-	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					1,038,364,700	1,022,592,150	98.48			
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data PBI JKN yang telah di Verifikasi dan Validasi	dokumen	1	1	107,947,100	107,782,000	99.85	Pendataan Fakir miskin oleh desa melalui operator Desa blm updating secara berkala dilakukan	Meningkatkan Kualitas SDM dan Sarpras	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin/DTKS yang harus dimuktakhirkan	dokumen	1	1	37,654,600	32,646,850	86.70	Ada yang diusulkan untuk di hapus karena naik status blm bisa di approval oleh Kemensos	Koordinasi secara intens dengan instansi vertikal	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fasilitator BPNT; Jumlah Keluarga penerima manfaat dan jumlah laporan (PKH dan BPNT)	orang, kk, buku	115 org, 26391 kk dan 24 buku	115 org, 26391 kk dan 24 buku	861,296,950	850,736,600	98.77	-	-	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang dibantu	orang	25	99.82	31,466,050	31,426,700	99.87	-	-	
	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanganan Bencana	Persentase Dukungan Terhadap Penanganan Bencana	Persen	100.00	99.77	116,055,950	115,003,200	50.25			

		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					50,776,200	50,556,700	99.57			
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Lokasi Sarana dan Prasarana Korban Bencana	Lokasi	1	1	32,840,400	32,804,200	99.89	-	-	
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah lokasi satgas bencana alam dan sosial	Lokasi	1	1	17,935,800	17,752,500	98.98	-	-	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					65,279,750	64,446,500	98.72			
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi Satgas Bencana Sosial	Kec	2	2	11,111,450	11,108,000	99.97	-	-	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM TAGANA	orang	25	25	54,168,300	53,338,500	98.47	-	-	
	Meningkatnya Penanggula ngan Kemiskinan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Dukungan Terhadap Layanan Makam Pahlawan	Persen	85.00	88.00	200,000,000	200,000,000	100.00			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					200,000,000	200,000,000	100.00			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Ha	4	4	200,000,000	200,000,000	100.00	-	-	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	1. B Opini 2. 90%	1. B Opini 2. 90%	7,275,865,339	5,946,366,198	81.73			

		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22,930,650	21,759,650	94.89			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	8,705,300	8,284,300	95,16			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	4,671,000	4,471,000	95,72			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3,831,300	3,631,300	94,78			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	5,723,050	5,373,050	93,88			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6,187,229,089	4,931,448,299	79.70			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	41	41	6,170,288,039	4,914,507,249	79,65			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	16,941,050	16,941,050	100,00			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4,011,300	4,010,550	99.98			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	20	4,011,300	4,010,550	99,98			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					39,395,550	39,295,550	99.75			
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak	Orang	150	150	39,395,550	39,295,550	99,75			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					202,785,250	179,077,494	88.31			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Item	18	18	19,988,550	19,988,550	100,00			

			Bangunan Kantor yang Disediakan									
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	22	22	24,179,550	24,179,550	100,00			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Item Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Item	47	47	49,998,350	49,973,200	99,95			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Penggandaan Kantor Yang Dibutuhkan, Jumlah Item Cetak Kantor Yang Dibutuhkan	Lembar, Item	10098 Lembar, 6Item	10098 Lembar, 6Item	29,999,200	28,741,600	95,81			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu yang dibutuhkan	Dus	490	490	20,000,000	19,980,000	99,90			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dibutuhkan, Jumlah Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dibutuhkan	OH	53 OH, 113 OH	53 OH, 113 OH	50,505,000	28,359,994	56,15			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	8,114,600	7,854,600	96,80			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					86,538,050	86,276,000	99.70			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Item Mebel yang Disediakan	Item	4	4	29,552,450	29,476,000	99,74			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jenis	2	2	56,985,600	56,800,000	99,67			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					562,415,450	521,263,755	92.68			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	95,105,050	81,642,479	85,84			

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi, jumlah jasa tenaga IT yang dibutuhkan, jumlah jasa tenaga keamanan, jumlah jasa tenaga kebersihan, jumlah non pns yang terpenuhi jaminan kesehatannya, jumlah non pns yang terpenuhi jaminan ketenagakerjaannya, jumlah pegawai tidak tetap	Orang	8 orang, 1 orang, 3 orang, 3 orang, 14 orang, 14 orang, 4 orang	8 orang, 1 orang, 3 orang, 3 orang, 11 orang, 11 orang, 4 orang	467,310,400	439,621,276	94,07			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170,560,000	163,234,900	95.71			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	71,600,000	64,775,900	90,47			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	69,960,000	69,459,000	99,28			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	29,000,000	29,000,000	100,00			

Tabel 3.10
Program Penunjang pada Sasaran ke 3 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan remaja

No	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Anak dan Remaja	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					963,875,903	866,704,055	89.92		
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					963,875,903	866,704,055	89.92		
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peranserta Gender dalam Pembangunan	Persen	85.00	74.67	185,845,900	161,556,250	86.93		
		Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah					43,136,850	39,136,850	90.73		
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pengembangan kuangranyang Publik yang responsif Gender	Orang	50	50	43,136,850	39,136,850	90.73	Belum adanya Perda terkait Pengarustamaan Gender dan kurangnya kegiatan pengembangan ruang publik yang responsif gender	Berkolaborasi dan kkoordinasi antar eksekutif dan yudikatif dalam penyusunan Perda
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					74,338,550	56,403,550	75.87		
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, Hukum, sosial dn ekonomi	Orang	120	120	74,338,550	56,403,550	75.87	-	-
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					68,370,500	66,015,850	96.56		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Jambore; Jumlah Peserta Pembinaan Dharma Wanita Persatuan; Jumlah Peserta Pembinaan Dharma Wanita Persatuan; Jumlah Peserta yang mengikuti Hari Jadi PKK I K Kabupaten	organisasi	25	25	68,370,500	66,015,850	96.56	kurangnya informasi publik berupa media radio yang menjangkau pedesaan terkait pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi wilayah yang di perlukan	Door to door dan melakukan sosialisasi ke segala media publik
		Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja	Program Perlindungan Perempuan	Persen	90.00	80.84	326,600,948	312,823,950	95.78		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100.00	80.87	240,394,000	227,272,400	94.54		
		Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah peserta kegiatan	Orang	100	100	41,800,000	35,565,400	85.08	-	-

Pelaksanaan kegiatan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; Jumlah tim penanganan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan; Jumlah visum korban kekerasan bagi perempuan								
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksana kegiatan pendampingan	Orang	10	10	198,594,000	191,707,000	96.53	-	-
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					44,660,898	44,205,500	98.98		
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan dan pembentukan PATBM	org	50	50	25,900,000	25,894,800	99.98	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	rujukan	50	50	18,760,898	18,310,700	97.60	-	-

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan talkshow	Kecamatan	17	17	41,546,050	41,346,050	99.52		
		Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota								
	Meningkatnya pemberdayaan dan Perindungan Perempuan, Anak dan Kemaja	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas hidup dan Perindungan Perempuan	Persen	90.00	80.00	204,667,950	157,618,950	77.01		
		Keluarga Binaan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/ Kota			100.00	40.37	101,471,450	31,734,450	30.37		
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kab/kota	Orang	20	20	101,471,450	97,792,450	96.37		
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					103,196,500	59,826,500	57.97		
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten/ Kota	KK binaan PZWKSS	Orang	100	100	103,196,500	59,826,500	57.97	kurangnya pemahaman terkait manajemen pemasaran setelaan dilakukan pembinaan ternadap rekka dan kegaktayan mengurus perijaban untuk membuka usaha	pemberian bimbingan dan memberikan informasi terkait ijin usana
	Meningkatnya pemberdayaan dan Perindungan Perempuan, Anak dan Kemaja	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya Data Gender Anak	Persen	75.00	0.00	57,303,900	51,572,200	90.00		
		Analisis data, pengumpulan, penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabupaten/ Kota					57,303,900	51,572,200	90.00		
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data plan gender	Dokumen	1	1	57,303,900	51,572,200	90.00		
	Meningkatnya pemberdayaan dan Perindungan Perempuan, Anak dan Kemaja	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	65.00	90.00	165,766,505	159,661,505	96.32		
		Penyediaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/ Kota					22,306,505	22,106,505	99.10		
		Advokasi kebijakan dan Pendampingan pemenuhan hak Anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah belajar yang mengikuti kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan	Orang	50	50	22,306,505	22,106,505	99.10		

			Dunia usaha									
		pengadaan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan peningkatan Kualitas hidup Anak Kabupaten/Kota						143,460,000	137,555,000	95.88		
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas hidup Anak Kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tim dan peserta yang mendukung kegiatan pelayanan peningkatan kualitas hidup anak	Lokasi	6	6	143,460,000	137,555,000	95.88	belum tersedianya rumah aman untuk pelayanan	usulan kepada Provinsi terkait pemindahtanganan aset prov mjd aset pemkab pwk	
	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan danempuani, Anak dan Kemaja	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pemenuhan Perlindungan Khusus Hak Anak	Persen	55.00	11.74	23,690,700	23,471,200	99.07			
		PEMBERDAYAAN Lembaga penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah kabupaten/kota					23,690,700	23,471,200	99.07			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan Khusus tingkat Daerah kabupaten/kota	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	orang	50	50	23,690,700	23,471,200	99.07	-	-	

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	1. B Opini 2. 90%	1. B Opini 2. 90%	7,275,865,339	5,946,366,198	81.73		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					22,930,650	21,759,650	94.89		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	8,705,300	8,284,300	95,16		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	4,671,000	4,471,000	95,72		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	3,831,300	3,631,300	94,78		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	5,723,050	5,373,050	93,88		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6,187,229,089	4,931,448,299	79.70		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	41	41	6,170,288,039	4,914,507,249	79,65		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	16,941,050	16,941,050	100,00		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4,011,300	4,010,550	99.98		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	20	4,011,300	4,010,550	99,98		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					39,395,550	39,295,550	99.75		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak	Orang	150	150	39,395,550	39,295,550	99,75		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					202,785,250	179,077,494	88.31		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Item Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Item	18	18	19,988,550	19,988,550	100,00		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	22	22	24,179,550	24,179,550	100,00		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Item Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Item	47	47	49,998,350	49,973,200	99,95		

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Penggandaan Kantor Yang Dibutuhkan, Jumlah Item Cetak Kantor Yang Dibutuhkan	Lembar, Item	10098 Lembar, 6 Item	10098 Lembar, 6 Item	29,999,200	28,741,600	95,81		
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu yang dibutuhkan	Dus	490	490	20,000,000	19,980,000	99,90		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dibutuhkan, Jumlah Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dibutuhkan	OH	53 OH, 113 OH	53 OH, 113 OH	50,505,000	28,359,994	56,15		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	8,114,600	7,854,600	96,80		

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86,538,050	86,276,000	99.70		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Item Mebel yang Disediakan	Item	4	4	29,552,450	29,476,000	99,74		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jenis	2	2	56,985,600	56,800,000	99,67		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					562,415,450	521,263,755	92.68		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	95,105,050	81,642,479	85,84		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi, jumlah jasa tenaga IT yang dibutuhkan, jumlah jasa tenaga keamanan, jumlah jasa tenaga kebersihan, jumlah non pns yang terpenuhi jaminan kesehatannya, jumlah non pns yang terpenuhi jaminan ketenagakerjaannya, jumlah pegawai tidak tetap	Orang	8 orang, 1 orang, 3 orang, 3 orang, 14 orang, 14 orang, 4 orang	8 orang, 1 orang, 3 orang, 3 orang, 11 orang, 11 orang, 4 orang	467,310,400	439,621,276	94,07		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170,560,000	163,234,900	95.71		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	71,600,000	64,775,900	90,47		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	2	2	69,960,000	69,459,000	99,28		

			Dipelihara/Direhabilitasi								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	29,000,000	29,000,000	100,00		

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Anggaran atas Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	1.1	Tingkat Pemenuhan Dukungan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	%	100	116.81	116.81	1	Program Pemberdayaan Sosial	166.675.250	166.463.150	99.87
								2	Program Rehabilitasi Sosial	733.045.800	622.955.200	99.74
								3	Program Perlindungan Jaminan Sosial	1.076.310.050	1.039.595.550	95.5
								4	Program Penanganan Bencana	116.055.950	115.003.200	99.8
		1.2	Tingkat Pemenuhan Dukungan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									
1.3	Tingkat Pemenuhan Pembinaan anak Terlantar											
1.4	Tingkat dukungan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial											
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						116.81	TOTAL PER SASARAN		2.092.087.050	1.944.017.100	98.7	
TINGKAT EFISIENSI 1.3 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 118.34 %												

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Anggaran atas Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Remaja	1.1	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap kelembagaan Pengarustamaan Gender	%	100	100	100	1	Program Pengarustamaan Gender	185.845.900	161.556.250	86.93
		2						Program Pengelolaan Sistem data gender dan anak	57.303.900	51.572.200	90	
		3						Program Perlindungan Khusus Anak	23.690.700	23.471.200	99	
		4						Program Pemenuhan Hak anak	164.766.505	159.661.505	97	
		5						Program Perlindungan Perempuan	326.600.948	312.823.950	95.78	
		6						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	204.667.950	157.618.950	76.5	
		1.2						Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	100	100	100	100
1.3	Tingkat Pemenuhan dukungan terhadap peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan											
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						100	TOTAL PER SASARAN	962875.903	871.610.955	90.8		
TINGKAT EFISIENSI 9.2 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 110.13 %												

YANG PERNAH DI RAIH TA 2022

TINGKAT	JENIS PENGHARGAAN / PRESTASI	TAHUN PENGHARGAAN
NASIONAL	Anugrah Kota Layak Anak dari Kementrian PPA	2022





BAB IV

2022

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

BAB IV

PENUTUP



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta merupakan instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang sosial dan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja (Performance result) selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan akuntabilitas kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan-hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Keberhasilan Capaian Kinerja tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan

evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2021 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja pada tahun mendatang, sasaran atau program yang belum tercapai seratus persen akan di evaluasi, sehingga seluruh sasaran program pada tahun mendatang nantiya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi terbaik untuk mengatasinya.

Saran yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara holistik dan berkesinambungan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan dan pembinaan kualitas sumber daya manusia baik aparatur di OPD maupun petugas atau pendamping khusus program/kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Pemerintah Daerah bukanlah pemain tunggal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, melainkan perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya terobosan agar dunia usaha atau sektor swasta yang bergerak di Kabupaten Purwakarta dapat berpartisipasi aktif melalui Corporate Social Responsibility (CSR)/ TJSLP terutama dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu ditingkatkan terutama terkait anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti pengentasan

kemiskinan dan Penanganan PMKS lainnya.

4. Dengan adanya LAKIP diharapkan bisa dijadikan bahan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah dan perbaikan layanan publik agar menjadi semakin baik.

Demikian Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta tahun 2022 ini, secara ringkas seluruh capaian tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta, selain itu diperlukan juga komitmen dan konsistensi seluruh aparatur dan unsur masyarakat dalam upaya peningkatan sumber daya secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya agar memperoleh hasil capaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

FOTO FOTO KEGIATAN 2022

DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SANGGAHAN PADA APLIKASI CEKBANSOS/SIKS-NG DESA CIANTING KECAMATAN SUKATANI



Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyaluran KKS program PKH dan BPNT di Kecamatan Purwakarta



Kegiatan Pembinaan dan optimalisasi peran operator SIKS-NG se-kecamatan Bungursari



**Kegiatan Pembinaan dan optimalisasi peran operator SIKS-
NG se-kecamatan Babakan Cikao**



Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyaluran KKS program PKH dan BPNT di Kecamatan Jatiluhur



Kegiatan Penyuluhan Sosial bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di lokus P2WKSS





Asistensi Pengujian Data Bantuan Sosial oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial di Kecamatan Babakanciko Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Sukatani







Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Tahun 2022

DOKUMENTASI KEGIATAN

Kegiatan Monev Penyaluran Program Sembako/BPNT



Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Sosial tentang Optimalisasi Peran Operator SIKS-NG Desa



Kegiatan pelayanan sosial penanganan fakir miskin dan pengolahan DTKS pada kegiatan gempungan di 3 desa





MONEV PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT BBM) DI DESA PANYINDANGAN





RAKOR PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN



BIDANG LINJAMSOPFM BEKERJA SAMA DENGAN LKSA BUNGA TUNJUNG SETO MELAKUKAN PENJANGKAUAN KEPADA ANAK YANG PUTUS SEKOLAH UNTUK KEMBALI MELANJUTKAN SEKOLAH



PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI



RAKOR SDM PKH EVALUASI KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2022





PENINGKATAN KAPASITAS SDM PKH TAHUN 2022



Pemberian Bantuan Kursi Roda



Pemberian Bantuan uang Transpot kepada orang terlantar



Pemberin Bantuan permakanan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial



Pemberian Bantuan berupa Alat bantu tongkat ketiak



Pemberian bantuan kepada Disabilitas



Sosialisasi verpali kelayakan BNBA *By Name By Adress* / Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)



Pendampingan Motekar dalam kegiatan pemberian Vaksin kepada masyarakat



Penjemputan dan Pemulangan Orang Terlantar (OT) yang dijanjikan akan dipekerjakan oleh agen pekerja ilegal



Pemberian Bantuan Sosial kepada Pemulung



kegiatan konselor psikologi sedang melakukan terapi terhadap anak korban kekerasan seksual dan ibu korban



Mengantarkan ODGJ kepada keluarganya setelah dilakukan print retina ke disduk Pwk



Home visit ke rumah anak korban kekerasan oleh ayah kandung yang warga negara Belanda..



Apel Kesiap siagaan Bencana , Tim TAGANA



Kegiatan Pensosmas (Penyuluh Sosial Masyarakat)



Sosialisai PBI



Monev Anak Terlantar di LKSA



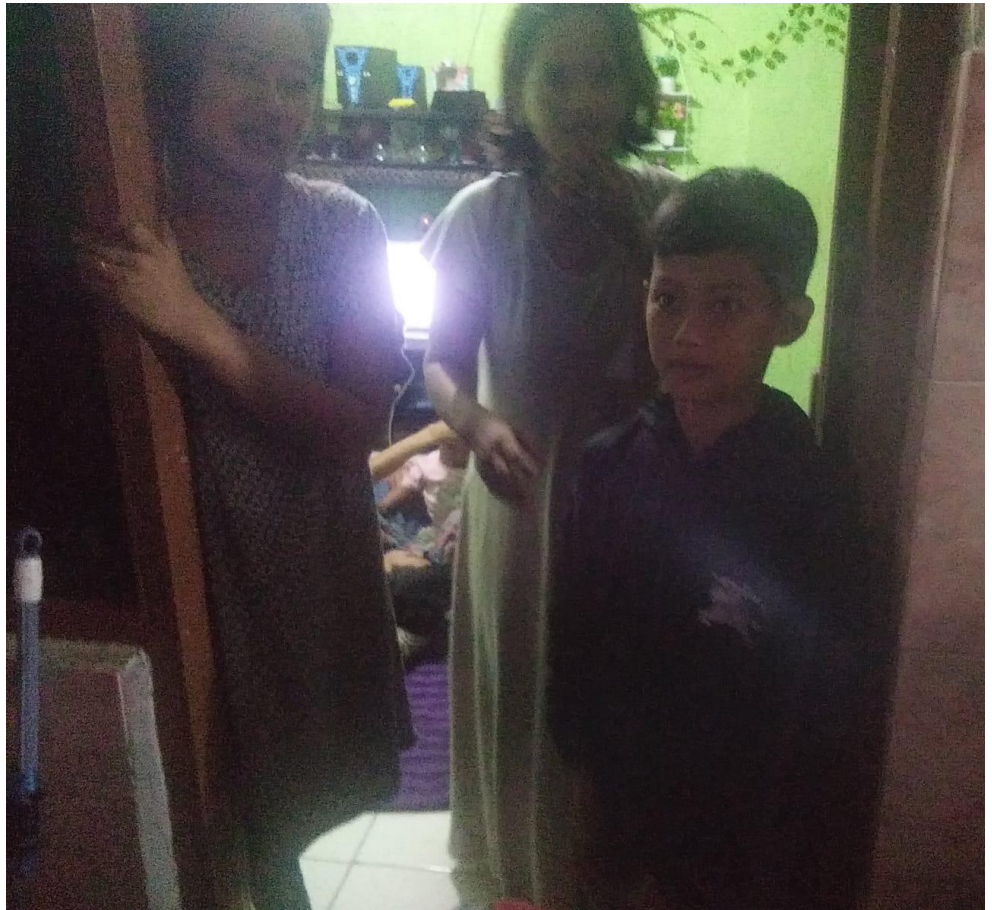
Rapat Koordinasi Terkait Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS dengan stakeholder



Audensi Penanganan PBI



Penjangkauan Anak Terlantar



Penjangkauan anak terlantar



Pemadanan Data dengan Operator Desa



Mitra Binaan e warung



Gebyar PKH



Apel Siaga Bencana



Monitoring kartu bantuan Sembako



Koordinasi Bnasos sembako dengan bank BNI terkait kartu



Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai BPNT



Motekar giat Vaksin



Penjemputan orang telantar



Pelaksanaan pembinaan dana pemberian bantuan kepada para Pemulung



Penerimaan Tamu konseling ke konselor P2TP2A



Koneseling pada tim professional P2TP2A kekerasan terhadap Perempuan



Penanganan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga



Penanganan



Sosialisasi Data Pilah gender



Kegiatan P2WKSS





Pengembangan Kegiatan Masyarakat (PEKKA)



Kegiatan PUG Pengarustamaan Gender dan PPRG

Kegiatan Wisuda Sekpoer Cinta Sekolah Perempuan menggapai Cita –cita



Kegiatan Pembinaan Perempuan

